

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN FUNDAMENTAL



ANALISIS KEBUTUHAN KEBIJAKAN TUTORIAL

DARI SUDUT PANDANG TUTOR

DURRI ANDRIANI
(NIDN 0017096102)

IRZAN TAHAR
(NIDN 0007075709)

LILIAN SARAH HIARIEY
(NIDN 0026128501)

UNIVERSITAS TERBUKA
FEBRUARI 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kebutuhan Kebijakan Tutorial dari Sudut Pandang Tutor

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 710/Ilmu Pendidikan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Durri Andriani

b. NIDN : 0017096102

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Pendidikan Ekonomi

e. Nomor HP : 08129114520

f. Alamar Surel : durri@ut.ac.id; durri_andriani@yahoo.com

Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Irzan Tahar

b. NIDN : 0007075709

c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Anggota Peneliti 2

a. Nama Lengkap : Lilian Sarah Hiariey

b. NIDN : 0026128501

c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1

Biaya Tahun Berjalan : Rp.55.000.000,-

Tangerang Selatan, 28 Februari 2014

Mengetahui Dekan FKIP,

Ketua Peneliti,

Udan Kusmawan
NIP. 19690405 199403 1 002

Durri Andriani
NIP. 19610917 198601 2 001

Menyetujui, Ketua LPPM

Kristanti Ambar PUsпитasari
NIP.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Urgensi Penelitian	3
1.4 Target Temuan	4
1.5 Kontribusi Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tutorial di UT	8
2.2. Kebijakan pada Insitusi Pendidikan Jarak Jauh	9
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
3.1. Tujuan Penelitian	13
3.2. Manfaat Penelitian	13
BAB 4. METODE PENELITIAN	14
3.1. Tahapan Penelitian	15
3.2. Luaran. Penelitian	16
3.3. Indikator Capaian	17
BAB 5. HASIL & PEMBAHASAN	20
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 1. Daftar Tutorial Kit yang Sudah Diunggah di Website Universitas Terbuka	2
Tabel 2. Kontribusi (Bobot) dan Masa Berlaku Nilai	7
Tabel 3. <i>Policy Analysis Framework</i> untuk Pendidikan Jarak Jauh	9
Tabel 4. Three Tiered Policy Analysis Framework untuk Pendidikan jarak Jauh	10
Tabel 5. Sampel yang Direncanakan dalam Penelitian per UPBJJ UT	12
Tabel 6. UPBJJ Sampel dan Wilayah yang Diwakili	12
Tabel 7. Metode Penelitian	13
Tabel 8. Indikator Capaian	14
Tabel 9.	
Tabel 10.	

RINGKASAN

UT sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem PJJ telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan layanan bantuan belajar, khususnya tutorial. Kebijakan ini ditujukan untuk menjamin tercapainya standar minimal acuan pembelajaran dalam tutorial. Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain penugasan tutor yang telah diakreditasi, pedoman pelaksanaan tutorial, dan penyediaan tutorial kit. Untuk melengkapi kebijakan ini perlu dilakukan evaluasi pemahaman dan penilaian tutor, sebagai orang yang langsung melakukan kegiatan tutorial dan berinteraksi dengan mahasiswa, terhadap beragam kebijakan yang dikeluarkan UT. Disamping itu, perlu juga dilakukan pelibatan tutor dalam menentukan dan memformulasikan kebijakan terkait tutorial. Kebutuhan yang dirasakan tutor pada saat mereka melakukan tutorial perlu diperhatikan dan diakomodasi yang memungkinkan tutor merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan tutorial. Penelitian direncanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model *Policy Analysis Framework* (PAF). PAF dikembangkan oleh Gellman-Danley & Fetzber (1998) untuk menganalisis kebijakan pada institusi penyelenggara PJJ. PAF memungkinkan dilakukan analisis kebijakan yang terkait dengan tujuh aspek yang ada dalam institusi PJJ. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tutor di lingkungan UT, baik yang sudah mendapat Pelatihan maupun belum, sudah mendapat sertifikat maupun belum, serta menjadi tutor pada TTM maupun tutor. Sampel ditentukan secara cluster untuk mewakili setiap kelompok tutor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UT untuk mengembangkan strategi umum pemanfaatan layanan bantuan belajar untuk mahasiswa UT. Sementara itu, untuk tingkat program studi, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung keperluan tutor dalam pelaksanaan layanan bantuan belajar serta dalam penyempurnaan materi dan format tutorial yang sesuai dengan kebutuhan tutor untuk mendukung efektivitas layanan bantuan belajar

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan kualitas yang ditetapkan dan diterapkan di Universitas Terbuka (UT) mencakup juga kualitas layanan bantuan belajar untuk mahasiswa. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan layanan bantuan belajar adalah bahwa layanan bantuan belajar dirancang sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh serta layanan bantuan belajar diselenggarakan secara terstandar sesuai pedoman yang ditetapkan (Simintas UT 2012, Renstra & Renop UT 2010-2021). Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, bantuan belajar bagi mahasiswa UT diberikan dalam bentuk tutorial (Katalog UT 2012). Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Untuk memenuhi standar minimal acuan pembelajaran dalam tutorial, UT membutuhkan tutor yang kompeten.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan tutor yang kompeten, UT menetapkan kebijakan berupa kewajiban tutor untuk diakreditasi. Dalam Laporan Kerja Tahunan Rektor UT 2011, dinyatakan bahwa Program Akreditasi Tutor, yang dimulai sejak tahun 2010, sudah berhasil melatih 7.598 tutor. Hanya tutor yang sudah lulus dari Pelatihan yang berhak mengikuti proses akreditasi. Dari 7.598 tutor yang berhasil lulus dari Pelatihan, sebanyak 64% sudah dinilai untuk keperluan akreditasi dan 70% diantaranya berhasil lulus.

Selain pelatihan dan akreditasi tutor, kebijakan lain yang diambil UT untuk menjamin kualitas tutorial adalah penyediaan tutorial kit di website UT untuk digunakan pada kegiatan tutorial tatap muka (TTM). Pengembangan tutorial kit dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan TTM. Materi dalam kegiatan TTM yang dirancang dalam delapan kali pertemuan mencakup (1) kompetensi esensial atau konsep penting dalam suatu mata kuliah; (2) masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul; (3) persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktek/praktikum) mahasiswa di dalam atau di luar kelas tutorial; dan/atau (4) masalah yang terkait dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari (Katalog UT 2012). Sesuai dengan kebutuhan materi pada TTM, tutorial kit yang dikembangkan disyaratkan terdiri dari (1) Peta Konsep, (2) Rancangan Acara Tutorial, (3)

Satuan Acara Tutorial untuk delapan kali pertemuan tutorial, (4) bahan prsesntasi untuk delapan kali pertemuan tutorial, serta (5) tiga Rancangan Tugas Tutorial. Sampai dengan 8 Januari 2013, sudah tersedia tutorial untuk 358 matakuliah.

Pengunggahan tutorial kit ke *website* UT (<http://www.kit.tutor.ut.ac.id>) dilakukan dengan tujuan agar UPBJJ UT melalui Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar (BBLBA) dan staf yang ditugaskan mengelola kit tutorial dapat mengunduh tutorial kit dan mendiseminasikan tutorial kit ke tutor yang belum pernah mengikuti Pelatihan. Pada kenyataannya, pemanfaatan tutorial kit yang sudah diunggah ke *website* UT masih sangat terbatas (Laporan Kerja Tahunan Rektor Universitas Terbuka 2011, April 2012).

Masih rendahnya pemanfaatan tutorial kit dapat disebabkan karena minimnya pelibatan tutor dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan tutorial. Tutor masih diberlakukan sebagai pihak yang harus melaksanakan keputusan UT yang terkait dengan tutorial. Pada kenyataannya, di lapangan justru tutor yang memegang kendali karena merealah yang langsung berhadapan dengan mahasiswa. Tutor lebih tahu tentang kebutuhan riil mahasiswa yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan yang terkait tutorial. Sejalan dengan definisi tutorial sebagai kegiatan dimana tutor berperan sebagai fasilitator dan "... membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa." (Katalog UT2013, Hal. 34), tutor dapat dilihat sebagai pihak yang tahu tentang hal-hal yang dianggap sulit untuk dikuasai mahasiswa. Tutorial kit yang berisi materi yang baku mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang langsung dihadapi tutor.

Disamping itu, masukan tutor juga diperlukan untuk meningkatkan keefektivan pelaksanaan tutorial. Begitu juga dengan monitoring dna evaluasi. Tutor merupakan salah satu pihak yang bersentuhan langsung dengan rproses tutorial sehingga dapat merasakan kebutuhan tutorial yang nyata. Kebutuhan tutor ini dapat dijadikan masukan dalam merencanakan, menjalankan, menganalisis, dan menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tutorial. Kebutuhan tutor yang berkaitan dengan tutorial yang efektif perlu diakomodasi dalam kebijakan yang diputuskan UT.

1.2. URGENSI PENELITIAN

UT sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem PJJ telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan layanan bantuan belajar, khususnya tutorial. Kebijakan ini ditujukan untuk menjamin tercapainya standar minimal acuan pembelajaran dalam tutorial. Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain penugasan tutor yang telah diakreditasi, pedoman pelaksanaan tutorial, dan penyediaan tutorial kit. Untuk melengkapi kebijakan ini perlu dilakukan evaluasi pemahaman dan penilaian tutor, sebagai orang yang langsung melakukan kegiatan tutorial dan berinteraksi dengan mahasiswa, terhadap beragam kebijakan yang dikeluarkan UT. Disamping itu, perlu juga dilakukan pelibatan tutor dalam menentukan dan memformulasikan kebijakan terkait tutorial. Kebutuhan yang dirasakan tutor pada saat mereka melakukan tutorial perlu diperhatikan dan diakomodasi yang memungkinkan tutor merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan tutorial.

1.3. TARGET TEMUAN

Penelitian ini ditargetkan akan menghasilkan mekanisme pengambilan kebijakan yang efektif yang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta kontrol tutorial berdasarkan kebutuhan tutor.

Secara khusus, Penelitian ini ditargetkan akan menghasilkan:

1. Evaluasi pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial
2. Evaluasi penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial
3. Evaluasi kebutuhan tutor tentang pelaksanaan tutorial

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TUTORIAL DI UT

Dalam katalog UT 2012 dijelaskan bahwa tutorial di UT adalah bentuk layanan bantuan belajar bagi mahasiswa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan belajar dalam tutorial dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Pada pelaksanaan tutorial dilakukan pembahasan dan diskusi hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa dalam konteks mata kuliah tertentu. Materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial mencakup:

1. Kompetensi esensial atau konsep penting dalam suatu mata kuliah
2. Masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul
3. Persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktek/praktikum) mahasiswa di dalam atau di luar kelas tutorial
4. Masalah yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

UT menyediakan tiga jenis tutorial, yaitu (1) tutorial tatap muka (TTM), (2) Tutorial *online* (tuton), dan (3) tutorial melalui radio, televisi, dan media cetak. Dalam tuton mahasiswa dituntut berpartisipasi aktif mempelajari materi inisiasi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Partisipasi meliputi keaktifan dalam mempelajari materi inisiasi dan diskusi dengan sesama mahasiswa serta tutor. Mahasiswa dapat memilih jenis tutorial yang disediakan UT, sesuai dengan minat maupun kemampuannya. Berikut ini penjelasan dari ke tiga jenis tutorial tersebut (Katalog UT 2012).

1. Tutorial Tatap Muka

TTM dilaksanakan oleh UPBJJ-UT sebanyak 8 kali pertemuan per mata kuliah per semester. Selama tutorial mahasiswa diberi 8 materi inisiasi, 7 topik diskusi, dan 3 tugas (pada pertemuan ke 3, 5, dan 7). Tugas yang menuntut penguasaan konsep harus dikerjakan di kelas pada saat tutorial, sedangkan tugas yang bersifat unjuk kerja atau praktek dapat dikerjakan di luar kelas tutorial. Tutor berasal dari PTN/PTS/Dinas Pendidikan/LPMP/instansi lain yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UT. Untuk memperoleh informasi tentang jadwal, tempat, dan biaya tutorial, mahasiswa dapat menghubungi UPBJJ-UT setempat.

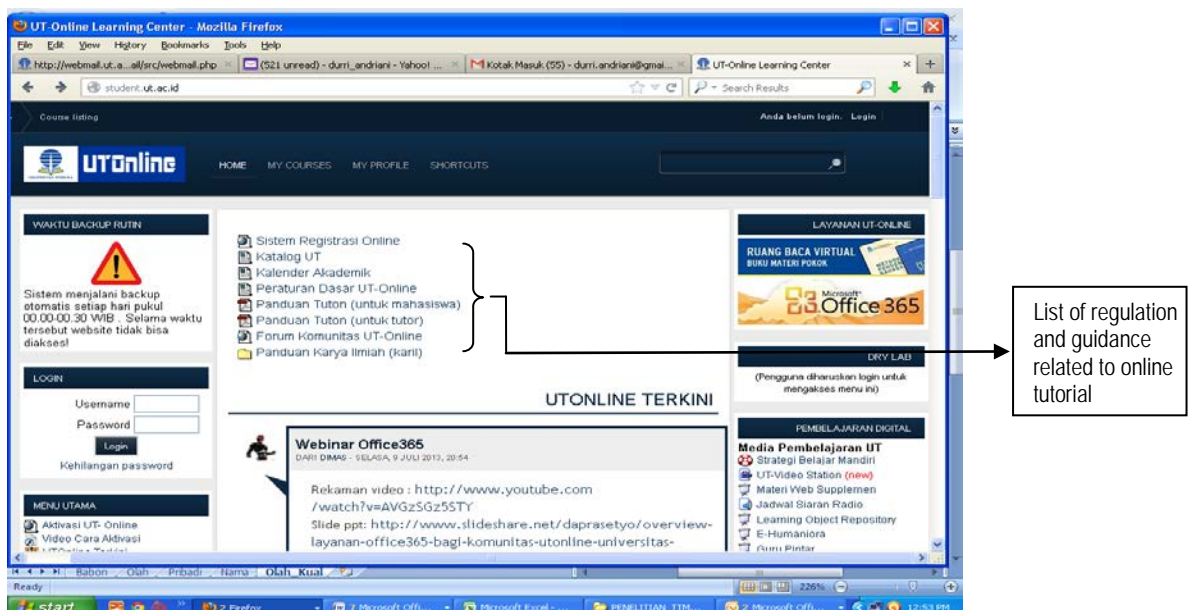
2. Tuton

Tuton terdiri atas tuton mata kuliah dan tuton Tugas Akhir Program (TAP). Tuton mata kuliah meliputi 8 inisiasi, 7 topik diskusi, dan 3 tugas yang dilaksanakan selama 8 minggu. Tugas dikerjakan dan dikirim kepada tutor tuton secara *online*. Tuton dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.ut.ac.id>. Mahasiswa dapat mengikuti Tuton sesuai dengan mata kuliah yang telah diregistrasikan. Sejak semester 2013, UT menyediakan tuton untuk semua matakuliah.

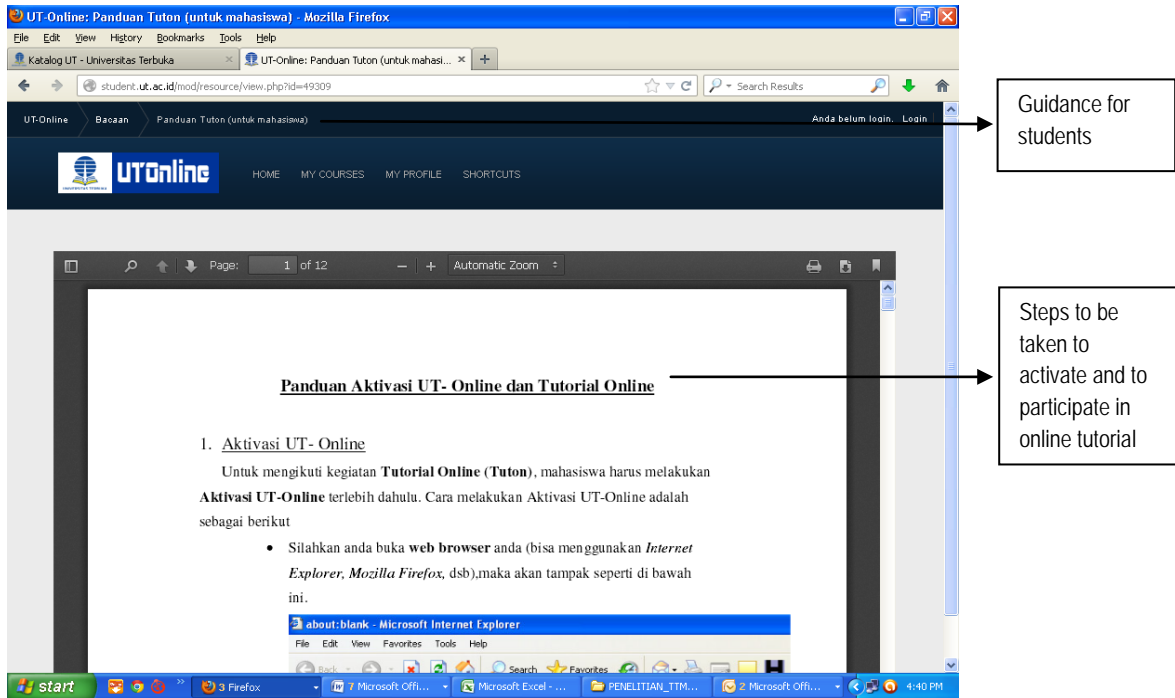
3. Tutorial Melalui Radio, Televisi, dan Media Cetak

Tutorial radio dilakukan dengan memanfaatkan radio (lewat Program Nasional 1 RRI). Tutorial melalui radio ini diadakan 6 kali dalam seminggu, Senin sampai dengan Sabtu. Sementara itu, khusus untuk guru, tutorial melalui televisi dapat disimak melalui TV Edukasi saluran 2. Di samping itu, beberapa media massa lokal juga menyajikan tutorial untuk mahasiswa UT.

Sebelum memulai tuton, mahasiswa peserta dan tutom diminta untuk membuka dan membaca aturan dan prosedur yang terkait dengan tuton. Gambar 1 memperlihatkan halaman pertama dari laman tuton UT.

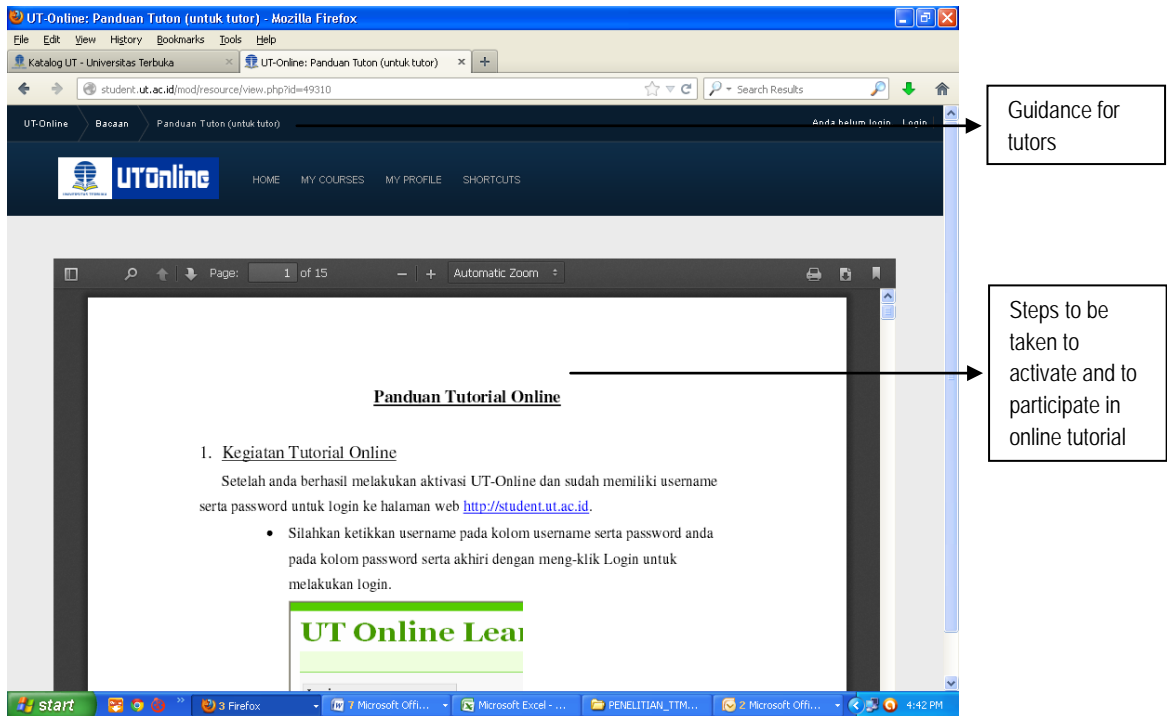


Picture 1. Homepage of UT Online



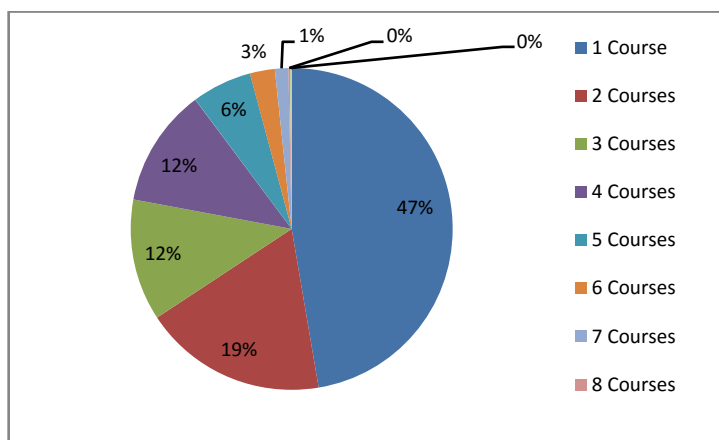
Picture 2. Guidance for Student

Pada Gambar 2, UT menyediakan langkah yang diperlukan pada saat mahasiswa dan tutor melaksanakan tuton.



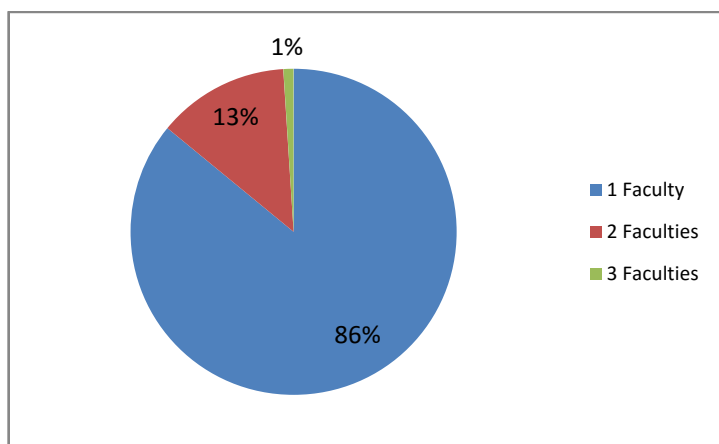
Picture 3 Guidance for Tutors

Sementara itu, pada Gambar 3 disajikan langkah yang harus dilakukan tutor untuk mengelola tuton. Pada pedoman ini tutor dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan aktivitas dalam tuton, prosedur mengunggah materi, dan komunikasi dengan mahasiswa peserta tuton. Dijelaskan juga mekanisme pemberian skor. Tetapi tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan aspek akademis tuton.



Data from UT Centre for Computer shows that up till 15 June 2013, UT has 598 online tutors. Most of the online tutors (47%) have been assigned to one course. However, there are some online tutors who experienced being assigned to more than one course. The largest number of courses assigned to one tutor is seven courses (1 tutor).

Gambar 3. Jumlah Matakuliah yang ditugaskan ke Tutor (N=598, %)



Meanwhile, looking at faculties where courses belong to, most of tutors (86%) have been assigned to one course from one faculty. However, there is one tutor who assign to three faculties. UT has four faculties, namely (1) faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Economics, Faculty of Political and Political Sciences, and Faculty of Teacher Training and Education, it is not impossible for one tutor to be assigned to more than one faculties.

Gambar 4. Jumlah Fakultas yang ditugaskan ke Tutor (N=598, %)

Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui pengerjaan tugas dan partisipasi dalam kegiatan TTM dan Tuton, Praktek atau Praktikum, Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas Akhir Program (TAP). Aspek yang dinilai dalam TTM adalah pengerjaan tugas dan partisipasi

dalam tutorial. Nilai dari tugas dan partisipasi tersebut mempunyai kontribusi 50% terhadap nilai akhir mata kuliah. Sementara aspek yang dinilai dalam Tuton, baik tuton mata kuliah maupun tuton TAP, adalah pengerjaan tugas dan partisipasi dalam tutorial. Nilai dari tugas dan partisipasi dalam tuton mata kuliah mempunyai kontribusi 30% terhadap nilai akhir mata kuliah, sedangkan untuk tuton TAP berkontribusi 50% terhadap nilai akhir TAP.

Dasar penilaian hasil belajar mahasiswa mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor 243/H31/KEP/2010 tentang Komposisi dan Bobot Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa Universitas Terbuka Tahun 2010. Salah satu aspek yang diatur dalam Surat keputusan tersebut adalah bobot dan masa berlaku nilai evaluasi hasil belajar (Tabel 2).

Tabel 2. Kontribusi (Bobot) dan Masa Berlaku Nilai

No.	Jenis Evaluasi Hasil Belajar	Non-Pendas		Pendas	
		Masa Berlaku	Kontribusi	Masa Berlaku	Kontribusi
1.	UAS Mata Kuliah	1 smt	Minimal 50%	1 smt	Minimal 50%
2.	Ujian TAP	1 smt	Minimal 50%	1 smt	Minimal 50%
3.	TTM Mata Kuliah	2 smt	50%	2 smt	50%
4.	TTM/ Bimbingan TAP	-	-	2 smt	50%
5.	Tuton Mata Kuliah	1 smt	30%	1 smt	30%
6.	Tuton/ Bimbingan TAP	2 smt	50%	2 smt	50%

Sumber: Katalog UT 2012, Hal. 35

Sementara itu, komposisi penilaian hasil belajar untuk setiap kelompok mata kuliah Program Sarjana dan Diploma yang bertutorial adalah sebagai berikut.

- b. Mata kuliah tidak berpraktek/berpraktikum tetapi bertutorial, nilai berasal dari UAS dan nilai TTM atau Tuton (diambil nilai yang tertinggi).
- c. Mata kuliah berpraktek atau berpraktikum, nilai berasal dari UAS dan nilai Praktek atau praktikum tanpa memperhatikan nilai TTM maupun Tuton.
- d. Tugas Akhir Program, nilai untuk Non-Pendas berasal dari ujian TAP dan tuton TAP sementara nilai untuk Pendas berasal dari nilai Tuton TAP atau TTM TAP

e. Mata kuliah khusus

Mata kuliah khusus diatur secara tersendiri oleh fakultas yang bersangkutan.

- 1) Jika mahasiswa hanya mengikuti TTM dan nilainya lebih tinggi daripada nilai UAS, maka kontribusi UAS menjadi 50%.

- 2) Jika mahasiswa hanya mengikuti Tuton dan nilainya lebih tinggi daripada nilai UAS, maka kontribusi UAS menjadi 70%.
- 3) Jika mahasiswa tidak memiliki nilai TTM dan Tuton atau nilai TTM dan Tutonnya lebih rendah dari nilai UAS, maka kontribusi UAS menjadi 100%.
- 4) Jika mahasiswa memiliki nilai TTM dan Tuton, maka yang diperhitungkan adalah kontribusi nilai UAS dan nilai tutorial yang tertinggi berkontribusi terhadap nilai akhir.
- 5) Nilai tidak bisa diterbitkan apabila tidak ada nilai UAS.

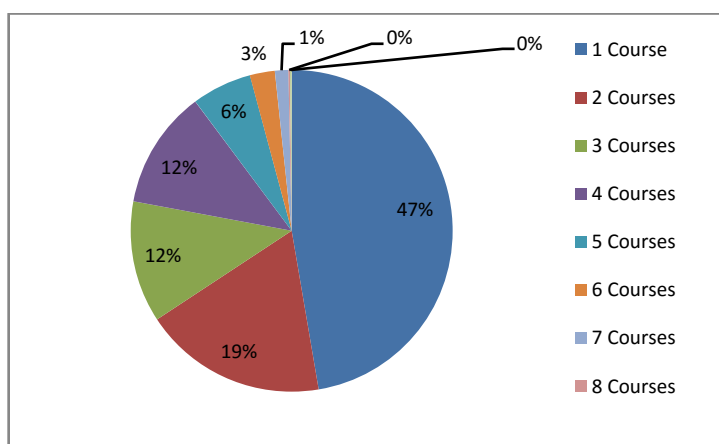
Bagi mahasiswa yang tidak berpartisipasi atau tidak memiliki nilai TTM atau Tuton, nilai akhir mata kuliah 100% dari nilai UAS. Apabila nilai TTM atau Tuton lebih rendah dari UAS maka nilai TTM atau Tuton tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir mata kuliah, sehingga nilai akhir mata kuliah 100% dari nilai UAS.

Salah satu kebijakan UT yang berkaitan dengan tutorial adalah bahwa materi tutorial harus direncanakan melalui pengembangan RAT dan SAT. UT memutuskan hal ini perlu dilakukan untuk membakukan kualitas materi pada kegiatan tutorial. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kepastian materi yang dijelaskan pada TTM tetapi di sisi lain kebijakan ini tidak sejalan dengan definisi TTM yang ditetapkan UT. Pada Latalog UT 2013, tutorial didefinisikan sebagai "... membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa." (Hal. 24). Lebih lanjut, dikatakan bahwa salah satu materi yang dibahas adalah masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul. Mengingat mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Indonesia, agak sulit memastikan mahasiswa UT di daerah yang berbeda mengalami masalah serupa, seperti yang ada pada tutorial kit.

Hal ini senada dengan pendapat Holmberg (1985) yang mengatakan bahwa salah satu karakteristik pendidikan jarak jauh adalah hubungan personal dan empati antara mahasiswa dan mereka yang mendukung seperti tutor dan konseleor. Perasaan empati dna memiliki berperan dalam memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa. Pembakuan materi dan sajian TTM belum tentu mencerminkan empati tutor kepada mahasiswa karena dapat terjadi materi dan sajian yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pendapat ini disetujui oleh Simonson (1995) yang menyatakan bahwa mahasiswa harus mengalami pembelajaran yang khusus dikemas sesuai dengan lingkungan dan situasi mereka. Dengan demikian, institusi pendidikan jarak jauh harus berusaha untuk memperhatikan kebutuhan belajar setiap mahasiswa. Tutor menjadi ujung tombak dalam upaya pemenuhan kebutuhan belajar karena merekalah yang langsung berhubungan dengan mahasiswa.

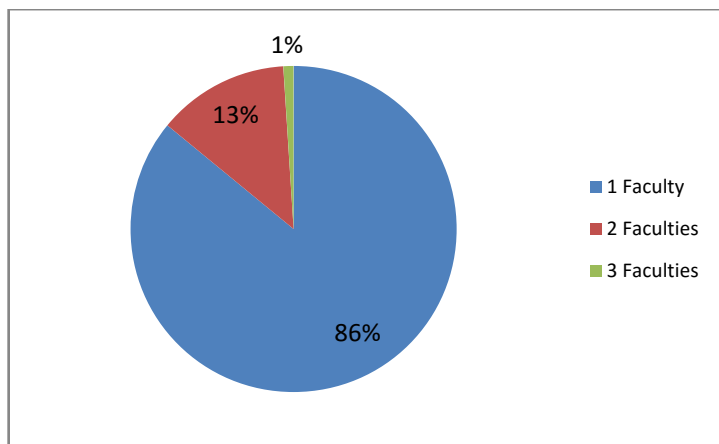
Meanwhile, Picture 3 provides steps for tutors to facilitate online tutorial. In the guidelines, tutors are provided with information related to activities in online tutorial, procedure to upload materials in online tutorial and communicate with students. It also describes procedure to entry student score from the online tutorial. However, there is no information on academic aspects of online tutorial.



Graph 1. Number of Courses Assigned to One Tutor (N=598, in %)

Data from UT Centre for Computer shows that up till 15 June 2013, UT has 598 online tutors. Most of the online tutors (47%) have been assigned to one course. However, there are some online tutors who experienced being assigned to more than one course. The largest number of courses assigned to one tutor is seven courses (1 tutor).

Meanwhile, looking at faculties



Graph 2. Number of Faculties Assigned to One Tutor (N=598, in %)

where courses belong to, most of tutors (86%) have been assigned o course from one faculty. However, there is one tutor who assign to three faculties. UT has four faculties, namely (1) faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Economics, Faculty of Political d\and Political Sciences, and Faculty of Teacher Training and Education, it is not impossible for one tutor to be assigned to more than one faculties.

In term of students' evaluation in online tutorial, UT regulates that student achievement in online tutorial is evaluated by quality of students' assignments and student's activities in discussions and contribute 30% from overall final score for student whose online tutorial score is higher than the score of student's final exam.

Gellman-Danley and Fetzner (1998) developed policy model for ODE which consists of seven groups namely (1) academic, (2) fiscal, (3) geography, (4) management, (5) human management, (6) law, and (7) learning support services. Berge (1998) added two aspects, technical and culture. This model has been used in several research (King, et al., 2000; King et al., 1998) and proven as effective framework to evaluate ODE policies. King et all (1998) demanded ODE policy to be integrated. In other words, policies which used as guidance for educational system have to include distance concept in delivery learning materials. This is where online tutorial, and policies in online tutorial, fit in place.

King, Nugent, Russell, and Lacy (1999) adapted Gellman-Danley & Fetzner and Berge Models on policy in ODE into Policy Analysis Framework (PAF) and differentiate seven elements in the Model (academic, administration/financial, academic staff, law, learning support services, technical, and culture) as the most appeared elements in ODE policies. PAF combines policy areas and groups issues into a relevant issue. Policy area in student learning services consists of issues such as material guidance and counseling, library access, students' trainings, evaluation monitoring, laboratories, and material delivery. Online tutorial fall into learning material delivery.

2.2. KEBIJAKAN PADA INSTITUSI PENDIDIKAN JARAK JAUH

King, Nugent, Russell, Eich, & Lacy (2000) mendefinisikan kebijakan pada pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai peraturan tertulis yang diadopsi institusi untuk memfasilitasi pengembangan program PJJ. Kebijakan yang membentuk seperangkat aturan dengan kesepakatan bersama untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak terkait,

menyediakan kerangka kerja untuk operasionalisasi PJJ. Kebijakan menyediakan struktur untuk kejadian yang tidak berstruktur dan merupakan langkah alami untuk proses adopsi inovasi, seperti PJJ. Satu indikator utama dari perkembangan PJJ untuk dapat bergerak sejajar dengan pendidikan tatap muka adalah kebutuhan untuk memiliki kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman yang efektif untuk perkembangan PJJ (Simonson, 2002).

Berge (1998) serta Gellman-Danley dan Fetzner (1998) memperkenalkan model kebijakan untuk PJJ, yang mencakup tujuh kelompok yaitu (1) akademik, (2) fiskal, (3) geografi, (4) pengelolaan, (5) manajemen tenaga kerja, (6) hukum, dan (7) layanan bantuan belajar. Berge (1998) menambahkan dua aspek lagi yaitu teknis dan budaya. Model ini sudah digunakan pada beberapa penelitian (King, et al., 2000; King et al., 1998) dan terbukti mampu digunakan sebagai kerangka kerja dalam meniai kebijakan PJJ. King et al (1998) menuntut kebijakan PJJ untuk terintegrasi. Dengan kata lain, kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk untuk system pendidikan harus memasukkan konsep penyampaian bahan ajar jarak jauh. Mahasiswa harus didefinisikan dari registrasi mereka pada matakuliah tertentu atau program studi tertentu bukan dari metode belajar yang digunakan, baik jarak jauh atau tatap muka (Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2003). Awalnya kebijakan PJJ mungkin harus dipisahkan dari kebijakan pendidikan yang ada tetapi pada akhirnya kedua metode pembelajaran ini harus bersatu. Kebijakan merupakan alat untuk memfasilitasi penyatuian antara kebijakan pendidikan secara umum dengan metode belajar jarak jauh.

King, Nugent, Russell, dan Lacy (1999) mengadaptasi Model Gellman-Danley & Fetzner serta Model Berge pada penelitian kebijakan PJJ di perguruan tinggi menjadi *Policy Analysis Framework* (Tabel 3) dan menetapkan bahwa tujuh elemen (Akademik, Administrasi/Keuangan, Staf akademik, Hukum, Layanan Bantuan Belajar, Teknis, dan Budaya) sebagai isu yang paling sering muncul pada kebijakan PJJ. *Policy Analysis Framework* (PAF) mengombinasikan area kebijakan dan mengelompokkan isu ke dalam kelompok yang lebih sesuai. Model PAF membantu melakukan identifikasi untuk pembuat keputusan mulai dari kebijakan yang sangat penting (misalnya teknis) sampai pada kebijakan spesifik di satu daerah (misalnya pilihan spesifikasi teknis media pembelajaran).

Banyak peneliti yang sudah memanfaatkan model ini pada saat melakukan analisis kebijakan PJJ (King, Nugent, Russell, & Lacy, 1999; King, Nugent, Russell, Eich, & Lacy, 2000). Mereka menemukan bahwa area kebijakan yang diidentifikasi pada Model pada kenyataannya memang merupakan kebijakan yang dominan.

Tabel 3. Policy Analysis Framework untuk Pendidikan Jarak Jauh

Area Kebijakan	Isu Kunci	
Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender Akademik • Integritas matakuliah • Tranfer kredit • Transkrip • Evaluasi mahasiswa/Matakuliah • Standar admisi • Kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasi • Penundaan kelas • Ketersediaan matakuliah/Program?Gelar • Rekrutmen • Pemasaran
Administrasi/Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya kuliah • Biaya teknologi • Biaya administrasi • Peraturan Keuangan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencairan biaya kuliah • Ruang • Penstafan
Staf	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi dan beban kerja • Insentif pengembangan • Pelatihan staf akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kelas • Tunjangan Staf akademik • Evaluasi Staf akademik
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Hak intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf akademik, mahasiswa, dan institusi <i>liability</i>
Layanan Bantuan Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan • Konseling • Akses perpustakaan • Penyampaian materi • Pelatihan mahasiswa • Pengawasan ujian 	<ul style="list-style-type: none"> • Video • Akunkomputer • Registrasi • Bantuan biaya • Laboratorium
Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Keterpercayaan (reliability) sistem • Akses • Perangkat keras • Perangkat lunak • Pertimbangan setup 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastuktur • Penunjang teknis (staf) • Penjadualan • Biaya
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Adopsi inovasi • Penerimaan pembelajaran jarak jauh 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai organisasi • Pemahaman terhadap pendidikan jarak jauh

Sumber: King, J., Nugent, G., Russell, E., Eich, J., & Lacy, D. (2000). Policy frameworks for distance education: Implications for decision makers. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 3(2).
<http://www.westga.edu/~distance/king32.html>

Dalam Penelitian ini, kebijakan yang akan dianalisis difokuskan pada penyampaian materi yang dilakukan oleh tutor. Tutor sebagai orang yang langsung berhadapan langsung

dengan mahasiswa akan diminta pendapat mereka terkait kebijakan tutorial yang dikeluarkan UT. Apa pemahamana dan penilaian tutor terhadap kebijakan UT yang terkait dengan penyampaian materi, dalam hal ini TTM, serta pendapat tutor tentang apa yang seharusnya ada dan diatur dalam kebijakan akan menjadi fokus dalam Penelitian ini.

Lebih jauh, King, Nugent, Russell, Eich, & Lacy (2000) menuliskan bahwa ke tujuh area kebijakan ini merupakan dasar penting untuk upaya pengembangan dan pengelolaan PJJ. Ke tujuh area kebijakan tersebut konsisten pada beragam sektor (jenjang sarjana diploma, dan sebagainya) dan beragam level (fakultas, staf akademik, sistem). Tujuh area pada PAF merupakan area dimana administrator dapat mengintervensi sistem PJJ untuk membuat dan mengelola perubahan.

10

Pada perkembangannya, untuk analisis yang lebih sederhana, King, Nugent, Russell, & Lacy (1999) mengembangkan *3-Tiered PAF* untuk PJJ dengan memadatkan tujuh area pada PAF menjadi tiga area: mahasiswa, staf akademik, serta majamen dan organisasi (Tabel 4). Meskipun lebih sederhana, Model ini tetap dapat membantu pembuat keputusan dalam membuat kebijakan terkait isu penting untuk tenaga akademik, layanan bantuan belajar, dan manajemen dari proses pendidikan serta isu teknologi. Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam kebijakan adalah proses mempertanyakan tersebut disertakan semua pihak terkait. Ini erat kaitannya dengan definisi kebijakan sebagai kerangka kerja yang disepakati dan dipatuhi semua pihak terkait.

Tabel 4. Three Tiered Policy Analysis Framework untuk Pendidikan Jarak Jauh

Area Kebijakan	Deskripsi
Dosen (termasuk Pendidikan Berkelanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan (misalnya uang saku, promosi, peningkatan penghasilan) • Dukungan (misalnya layanan mahasiswa, bantuan teknis, pelatihan) • Kesempatan untuk mempelajari teknologi dan aplikasi baru (misalnya pelatihan) • Hak intelektual (misalnya kepemilikan materi, copyright)
Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan (misalnya akses ke teknologi, perpustakaanm registrasi, bantuan biaya) • Persyaratan dan pencatatan (syarat residensi, alih kredit, pendidikan berkelanjutan)
Area Kebijakan	Deskripsi

<p>Manajemen dan Organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur biaya • Formula pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Kolaborasi (misalnya dengan departemen, unit, institusi lain) ○ Sumberdaya (misalnya sumberdaya finansial untuk menunjang pendidikan jarak jauh, peralatan, dan teknologi baru) ○ Kurikulum/matakuliah (misalnya modus penyampaian, pilihan matakuliah/progam studi, rencana pengembangan, pengembangan matakuliah, syarata interaktivitas, syarat evaluasi)
---------------------------------	--

Sumber: James W. King, Gwen C. Nugent, Earl B. Russell, Jenni Eich, & Dara D. Lacy. 2010.. Policy Frameworks for Distance Education: Implications for Decision Makers. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume III, Number II, Spring 2000.

BAB 3. TUJUAN PENELITIAN

3.1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah mengevaluasi kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial.

Secara khusus, Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial
2. Mengevaluasi penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial
3. Mengevaluasi kebutuhan tutor tentang pelaksanaan tutorial

3.2. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UT untuk mengembangkan strategi umum pemanfaatan layanan bantuan belajar untuk mahasiswa UT. Sementara itu, untuk tingkat program studi, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung keperluan tutor dalam pelaksanaan layanan bantuan belajar serta dalam penyempurnaan materi dan format tutorial yang sesuai dengan kebutuhan tutor untuk mendukung efektivitas layanan bantuan belajar.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian direncanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model *Policy Analysis Framework* (PAF). PAF dikembangkan oleh Gellman-Danley & Fetzber (1998) untuk menganalisis kebijakan pada institus penyelenggara PJJ. PAF memungkinkan dilakukannya analisis kebijakan yang terkait dengan tujuh aspek yang ada dalam institusi PJJ.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tutor di lingkungan UT, baik yang sudah mendapat Pelatihan maupun belum, sudah mendapat setrifikat maupun belum, serta menjadi tutor pada TTM maupun tuton. Sampel ditentukan secara *cluster* untuk mewakili setiap kelompok tutor. Pada Tabel 5 disajikan rincian sampel yang direncanakan dalam Penelitian ini.

Tabel 5. Sampel yang Direncanakan dalam Penelitian per UPBJJ UT

No.	Jenis Tutor	Σ Tutor pada Jenis Tutorial	
		TTM	Tuton
1	Belum Ikut Pelatihan	5	5
2	Sudah Ikut Pelatihan tetapi Belum Ikut Sertifikasi	5	5
3	Sudah Ikut Sertifikasi tetapi Tidak Lulus	5	5
4	Sudah Lulus Sertifikasi	5	5

Memperhatikan keterbatasan waktu dan biaya Penelitian tanpa meninggalkan aspek keterwakilan, dalam Penelitian ini dilakukan penarikan sampel UPBJJ yang akan dilibatkan dalam Penelitian. Penentuan sampel UPBJJ dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan lokasi UPBJJ. Untuk itu, ditentukan tiga UPBJJ dengan rincian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. UPBJJ Sampel dan Wilayah yang Diwakili

No.	Wakil Wilayah	UPBJJ UT
1	UPBJJ dengan jumlah mahasiswa banyak	Bandung
2	UPBJJ dengan jumlah mahasiswa sedang	Makassar
3	UPBJJ dengan jumlah mahasiswa sedikit	Ambon

Penelitian dilakukan dengan studi dokumen, menyebar kuesioner, dan wawancara dengan responden (tutor). Secara rinci, pada Tabel 7 disajikan rincian data yang diperlukan, sumber data untuk tiap jenis data yang diperlukan, metode pemerolehan data, dan metode analisis data untuk masing-masing tujuan Penelitian.

Tabel 7. Metode Penelitian

Tujuan Penelitian	Data yang diperlukan	Sumber Data	Metode Pemerolehan Data	Metode Analisis Data
1. Mengevaluasi pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial	<ul style="list-style-type: none"> • Data pemahaman tutor terhadap kebijakan UT dalam cakupan tutorial • Data tingkat pemahaman tutor terhadap kebijakan UT di bidang tutorial 	• Dokumen kebijakan UT	Sudi dokumen	Kualitatif
		• Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Kuesioner • Wawancara 	Kuantitatif
2. Mengevaluasi penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial	<ul style="list-style-type: none"> • Data penilaian tutor terhadap kebijakan UT dalam cakupan tutorial • Data tingkat penilaian tutor terhadap kebijakan UT di bidang tutorial 	• Dokumen kebijakan UT	Sudi dokumen	Kualitatif
		Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Kuesioner • Wawancara 	Kuantitatif
3. Mengevaluasi kebutuhan tutor tentang pelaksanaan tutorial	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi tutor pada pelaksanaan tutorial • Aspek tutorial yang perlu diatur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tahap persiapan ○ Tahap pelaksanaan ○ Tahap evaluasi 	Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Kuesioner • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Kualitatif
4. Mengevaluasi kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial	<ul style="list-style-type: none"> • Data kebutuhan tutor untuk pelaksanaan tutorial yang efektif 	Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Kuesioner • Wawancara 	<i>Policy Analysis Framework</i>
5. Mengembangkan Model perumusan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tutor	Data dari Langkah 1-4			<i>Policy Analysis Framework</i>

Statistik deskriptif akan digunakan untuk menganalisis data:

1. Tingkat pemahaman tutor terhadap kebijakan UT di bidang tutorial
2. Data tingkat penilaian tutor terhadap kebijakan UT di bidang tutorial
3. Kendala yang dihadapi tutor pada pelaksanaan tutorial
4. Aspek tutorial yang perlu diatur

Sementara itu, analisis kualitatif (dari hasil wawancara) dilakukan untuk data:

1. Pemahaman tutor terhadap kebijakan tutorial UT
2. Penilaian tutor terhadap kebijakan tutorial UT

Analisis untuk kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial akan dilakukan dengan pendekatan PAF yang dikembangkan Gellman-Danley & Fetzber dan disempurnakan oleh King, Nugent, Russell, dan Lacy (1999).

4.2. LUARAN PENELITIAN

Penelitian ini ditargetkan akan menghasilkan Model perumusan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tutor. Untuk itu, Penelitian ini akan menghasilkan data yang terkait dengan tingkat pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial, penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial, peta kebutuhan tutor terkait aspek dalam pelaksanaan tutorial, dan peta kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial.

Sesuai dengan PAF yang dijadikan rujukan dalam Penelitian ini, Model yang dihasilkan akan berisi aspek yang dinyatakan penting oleh tutor dalam kebijakan tutorial di UT.

4.3. INDIKATOR CAPAIAN

Pengukuran ketercapaian tujuan Penelitian dilakukan dengan membandingkan capaian riil Penelitian dengan indikator capaian yang disajikan pada Tabel 8.

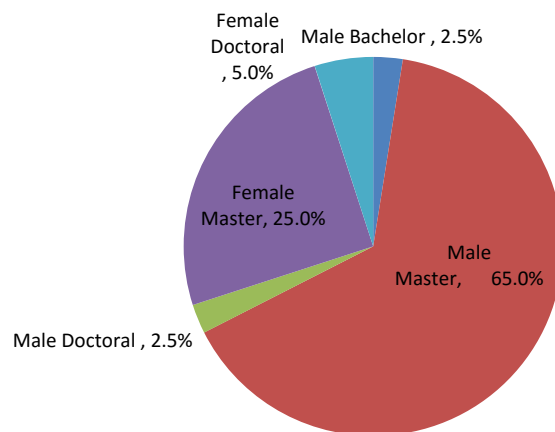
Tabel 8. Indikator Capaian Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian	Indikator Capaian
	Diperolehnya:
1. Mengevaluasi pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial	1. Tingkat pemahaman tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial*
2. Mengevaluasi penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial	2. Penilaian tutor terhadap kebijakan UT tentang tutorial
3. Mengevaluasi kebutuhan tutor tentang pelaksanaan tutorial	3. Peta kebutuhan tutor terkait aspek dalam pelaksanaan tutorial
4. Mengevaluasi kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial	4. Peta kebutuhan tutor terkait kebijakan UT tentang tutorial
5. Mengembangkan Model perumusan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tutor	5. Model perumusan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tutor

* Kebijakan tentang tutorial yang diteliti tergantung dari lamanya tutor terlibat sebagai tutor di UT

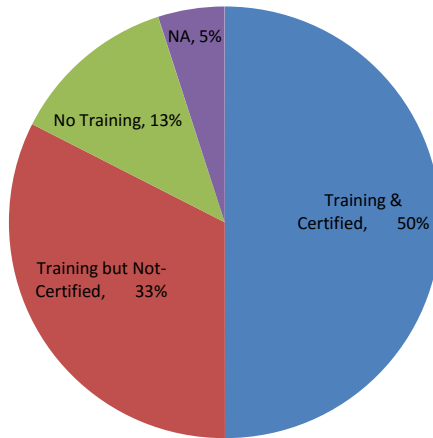
BAB 5. HASIL & PEMBAHASAN

In order to analyze online tutors perceptions towards UT policies in online tutorial, there is a need to gather data from online tutors on their knowledge and perceptions of UT policies related on line tutorial. Aspects in the policies that need to be analyzed include definition of online tutorial, roles of online tutorial, tutors and students in the online tutorial, requirements to be online tutors, and learning materials as well as students' evaluation mechanism in online tutorial. To serve its objective, online tutors were purposely chosen as respondents in this research. All 598 online tutors listed in UT Center for Computer were sent the research questionnaires via the tutors email address. The number of email which could not get through is 18%. Due a small number of the tutors sent back filled-out questionnaires, the questionnaires were sent back to the tutors who have not responded to the fists and second attempts. All 40 questionnaires filled-out and sent back were analyzed qualitatively using content analysis. Even though the number of respondents was small, information provided in the open-ended questionnaires were rich and covered all important issues related to policies in online tutorial.



Graph 3. Educational Level & Sex (N=40)

Most respondents in this research were male with master degree (65%, Graph 3), had attended one tutor training (88%, Graph 4), and first assigned as online tutors in 2010 (10%, Table 1).

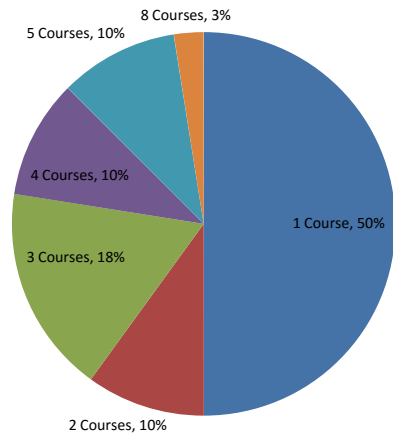


Graph 4. Tutors' Training & Certification (N=40)

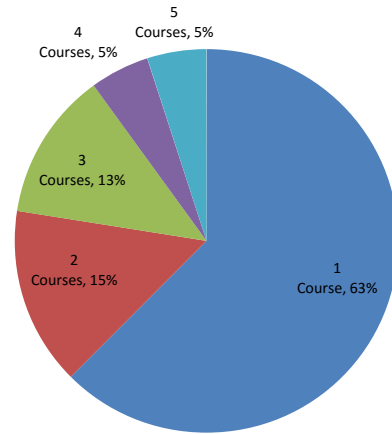
Table1. Year of First Assignment as Online Tutor (N=40, in %)

Year of First Assigned as Online Tutor	Total Courses				
	1	2	3	4	Total
1996	5	-	-	-	5
1999	2.5	-	-	-	2.5
2003	-	2.5	-	-	2.5
2005	5	-	-	-	5
2006	-	2.5	-	-	2.5
2008	5	-	-	-	5
2009	2.5	-	2.5	-	5
2010	10	-	5	5	20
2011	7.5	2.5	-	-	10
2012	7.5	-	2.5	-	10
2013	20	7.5	-0	-	27.5
NA	-	-	5	-	5
Total	65	15	15	5	100

One course in online tutorial for one tutor was also majority in the duration of tutor's assignment (50%, Graph 5) which last between 1-13 years. However, there was one online tutor who in 13 years acting as online tutors has been assigned to eight courses. Nevertheless, the assignment for one tutor in semester was never more than five courses (Graph 6)



Graph 5. Total Courses Assigned for One Online Tutor (N=40)



Graph 6. Total Courses Assigned for One Online Tutor in One Semester (N=40)

Data from the questionnaires were grouped according to their similarities in each issue and analyzed three domains: tutors' knowledge of the policy, tutors' evaluation of the policy, and tutors' needs to be included in the policy. The results are reported below in five sections: online tutors knowledge and perceptions of online tutorial definition; roles of online tutorial, tutors, and students; and learning materials and student' evaluation mechanism in online tutorial.

Definition of Online Tutorial

UT defines online tutorial as additional learning service to facilitate students in their learning process for some courses using the Internet, started 2-3 weeks after the last day of registration period, last in 8 weeks which consists of 8 initiations, three tasks, and a series of discussions. One class has a maximum of 200 students and one tutor can only be assigned to maximum 5 classes.

Most of the respondents were aware of the definition although there were respondents who mentioned that online tutorial was provided for all courses and compulsory for all students. In addition, respondents believed that limited each tutor to 4-6 course-class in one semester would benefit not only the tutors but also students. In case a tutor is assigned to 3 courses, then each class should not be more than 2 classes.

Tutors' assessment of the definition of online tutorials was varied, from not too good into very good. The not too-satisfied respondents mentioned several factors: too many students in one class that practically limit the tutors' interactions with students, late information on number of classes assigned to tutors, lack of IT support form UT, and lack of control during the online tutorial sessions. Meanwhile, satisfied respondents mentioned the benefit of online tutorials for students otherwise could not master learning materials since they do not have time to attend face-to-face tutorials, additional references for students, and interaction between tutor-students and students-students. In spite their differences in online tutorial definition, the respondents agreed on one thing: limit number of students to 30-50 in one class.

Roles of online Tutorials

UT states that online tutorial is aiming at facilitating students' learning process and most of the respondents agreed with this role. Some respondents even mentioned the benefit of online tutorials for students as motivating students to keep on studying. Therefore, students could master targeted learning materials and pass final examination.

Some of the respondents also believed that implementing online tutorials could help developing on-line learning community. However, they suggested that online tutorial could be more benefited if it utilized other gadget like Smartphone.

Roles of Tutors

Tutors play great roles in online tutorials. Tutors are responsible to develop initiation materials, assignments, and discussion topics. Tutors have to upload all the materials into the system while at the same time facilitate students' learning by moderating discussions, encouraging students' participations, and making sure students uploaded the assignments. In addition, tutors have to provide feedback and scores for students' works. Tutors also have responsibilities to entry students' final score and reporting all the activities to UT.

The respondents know their responsibilities and they tried to do it according to the regulation. However, some respondents did not know that they were responsible to upload

learning materials for online tutorials. They were waited for the UT, in this case course manager, to upload the materials for them. In some cases, the materials are already there because other tutors have uploaded them. However, some courses have to be passive for several weeks due to no materials uploaded.

Despite of the respondents' agreement on the roles of online tutors, some aspects need to be improved. Respondents mentioned their needs to have online tutorial guidance or manual. The one provided in the website was too technical and did not cover academic aspects of online tutorials. In addition, the respondents need training on how to use Internet for facilitating learning in online tutorials. In term of academic aspects, other than manual, the respondents also needed all relevant references to the course, including course blue print, modules, materials used in face-to-face tutors, and evaluation blue print. Moreover, to increase roles of the online tutors, they needed to regularly meet with other tutors from similar courses to discuss development in the courses and to agree on how to conduct the online tutorials.

Roles of Students

Every student registers in certain courses are automatically registered in the online tutorial of the courses given the courses have online tutorial. In online tutorial, students have to be actively involved in accessing the online tutorial facilities, learning all initiation materials, uploading all tasks, and engaging in discussions. Therefore, the student has to have access to the Internet, has an email address, and familiar with the online tutorial system. All respondents, to some degree, agreed to these roles of students in online tutorials.

However, some respondents argued on students' awareness of the facilities. One respondent mentioned his apprehension because out of four classes initially assigned to him, only one class finally active. The other three classes, set up based on registration database, has no students log in the class.

Therefore, respondents mentioned the necessary to socialize the existence and benefit of online tutorial to students in any occasions such as new students welcoming activities and

examination. For students who have utilized the online tutorials, they need to be reminded to follow procedures set up in the online tutorials. In some occasions, students send assignments to tutors' email. While this action did not necessarily wrong in term of academic engagement between tutors and students, the assignments would not be stored in the online tutorial system which could inflict the student. As a consequence, the student may not get score for the assignment. In some cases, students faced difficulties interacting using Internet. UT has the responsibilities to make sure that students are familiar with the Internet and accustomed with the online tutorial system. In addition, to increase students' roles in online tutorials, some respondents suggested the availability of limited synchronous communication between tutors-students. In the occasions, students could show their works and directly get comments from tutors and other students.

Requirements to be an Online Tutor

To be assigned as online tutors, one has to possess master degree in relevant field. Since the tutorial uses Internet, tutors are also required to have access to Internet, have email address, and familiar with the Internet.

All respondents know the requirements to be tutors and all, except one, comply. Some respondents added the requirements with professional, committed, and able to motivate students. Nevertheless, the respondents mentioned the necessity for online tutors to attend training on how to provide effective online tutorials and to familiarized tutors with the technical aspects of the system. Some respondents took it to the next level where they want tutors to be accredited. UT has started accrediting face-to-face tutors but the regulation is not yet implemented for online tutors. In addition, to increase the effectiveness of the online tutorials, respondents suggested that UT facilitate tutors with Internet facilities in their home so that tutors could be more easily engaged in the online tutorials.

Online Tutorial Initiation Materials

Materials for online tutorials are developed form difficult topics on the course module and the respondents know the policy. However, some respondents worried about the content of the modules. According to the respondents, learning materials in some modules were

outdated. As a consequence, it was impossible to use the modules as reference to be used in online tutorial. .

The respondents voiced their needs for learning materials in online tutorials to be more accountable and reliable. UT needs to allow tutors to use other materials which more relevant and updated to enriched the course. To provide effective learning experience for students, materials in online tutorials have also need to be synchronized with materials used in face-to-face tutorials and examination blueprints. Tutors also needed to attend trainings on how to write effective initiation materials. Other input to perfecting policy in online tutorial was the need to supervise the online tutorial. Due to heavy workload of online tutors, especially those with more than 100 students in one class, supervision is necessary to ensure the effectiveness of online tutorials.

Students' Evaluation Mechanism

The respondents knew the policy that students' evaluation in online tutorial is based on student's activities and quality of assignment and contribute to 30% of final score. However, the respondent did not quite happy with the policy since the evaluation mechanism was too focused on administrative activities (frequency of log in) and too subjective. The indicators were too loose.

Students' evaluation was one topic which received rich comments from the respondents. All of the respondents saw the importance to revise the evaluation mechanism. At least there were five aspects that need to be revised including:

1. Evaluation process needs to reflect academic reasons not just administrative justification,
2. Evaluation mechanism has to be objective and measurable,
3. Evaluation mechanism needs to be standardized,
4. Relation between students' achievement in online tutorial and in final examination need to be analyzed, and
5. Mechanism for student evaluation should be reliable which also include level of difficulty while at the same time easily to use.

In addition, tutors' roles in determining students' score should be increased to around 50%, not just 30% like presents time. Moreover, due to Internet difficulties students in some areas faced, proportions between discussion and assignments have to be reconsidered. Alternative assessment, such as portfolio, could also be considered to be used.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan PAF merupakan titik tolak dalam memilih dan menentukan layanan bantuan belajar dalam kebijakan layanan pada institusi pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Analisis terhadap kebijakan tutor di UT telah berhasil memberikan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan tutor yang sesuai dengan kebutuhan tutor. Melibatkan tutor yang merupakan satu pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian layanan bantuan belajar dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dilihat dari persepsi tutor, secara umum dapat disimpulkan bahwa tutor telah memahami pengertian tutorial, peran tutor dan peran mahasiswa, serta syarat menjadi tutor. Tutor menyatakan kebutuhan mereka untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tutorial. Aspek yang oleh tutor dipandang perlu untuk menjalani perubahan yang signifikan adalah aspek yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar mahasiswa. Menurut tutor, pertauran penilaian yang berlaku terlalu fokus pada aspek administrasi, subjektif, dan tidak adil. .

15

16

DAFTAR PUSTAKA

- Katalog UT 2012. 2012. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Laporan Kerja Tahunan Rektor Universitas Terbuka 2011. April 2012. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- King, J., Nugent, G., Russell, E., Eich, J., & Lacy, D. (2000). Policy frameworks for distance education: Implications for decision makers. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 3(2). <http://www.westga.edu/~distance/king32.html>. Diunduh 21 januari 2013.
- Barbara Gellman-Danley and Marie J. Fetzner. *Online Journal of Distance Learning Administration*, Volume I, Number 1, Spring 1998. State University of West Georgia, Distance Education. <http://www.westga.edu/~distance/danley11.html>. Diunduh 31 januari 2013
- Holmberg, B. 1985. The feasibility of a theory of teaching for distance education and a proposed theory. ZIFF Papiere 60. ERIC, ED 290013.
- Michael Simonson. 2002. Policy and distance education. *The Quarterly Review of Distance Education*, Volume 3(2), 2002, pp. v–vii. Age Publishing, Inc.
- Moore, M. G. 1994. Autonomy and interdependence. *The American Journal of Distance Education* 8 (2): 15.
- Berge, Z.L. 1998. Barriers to Online Teaching in Post-Secondary Institutions: Can Policy Changes Fix It? *Online Journal of Distance Learning Administration*. 1(2).
- Gellman-Danley dan Fetzner (1998) Asking the Really Tough Questions: Policy Issues for Distance Learning. *Online Journal of Distance Learning Administration*, Volume I, Number 1, Spring 1998. State University of West Georgia, Distance Education
- King, J.W., Lacy, D., McMillian, J., Bartels, K. & Freddolino, M. 1998. The Policy Perspective in Distance Education: A Futures Landscape/Panorama. Invited paper presented at the 1998 Nebraska Distance Education Conference. Lincoln, NE (September 28-29, 1998).
- Simonson, M. 1995. Does anyone really want to learn at a distance? *Tech Trends* 40 (5): 12.
- Simonson, M, S. Smaldino, M. Albright, and S. Zvacek. 2000. *Teaching and Learning at a Distance*. Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall.